

DAFTAR PUSTAKA

- Auerbach, A. J. (2009). Public Finance in Practice and Theory. *University of California Journal*, 1(1), 1–27.
- Azhariyah, P. E., Efrianti, D., & Rachman, R. (2022). Prosedur Penerimaan atas Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Hasil Hutan. *Jurnal Aplikasi Bisnis Kesatuan*, 2(3), 207–216. <https://doi.org/10.37641/jabkes.v2i3.1521>
- Kementrian Koordinator Bidang Kemaritiman. (2024). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Bidang Kemaritiman 2020 - 2024*.
- Multazam, & Abdullah, A. (2018). Kesadaran Membayar Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Sepeda Motor Di Polri Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 (Studi Kasus Masyarakat Kecamatan Jangka Buya) (pp. 30–43).
- Musgrave, R. A., & Musgrave, P. B. (1989). *Public Finance In Theory And Practice* (Fifth Edition). Singapore: McGraw-Hill Book Co.
- Nasution, N. I., & Nasution, J. (2022). Analisa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Kantor Kesyahbandaran Utama Belawan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(1), 4071–4077.
- Nasution, R. M. T., & Hasibuan, R. R. A. (2024). Pemanfaatan Penerimaan Bukan Pajak Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Pelaksanaan Anggaran Pengeluaran Dan Belanja Negara. *Jurnal Inovasi Dan Kreativitas (JIKA)*, 4(2), 65–76. <https://doi.org/10.30656/jika.v4i2.9379>
- Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut (2021).
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 16 Tahun 2023 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan (2023).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (2021).
- Phillips, R., & Rohde, F. (2006). Pricing and Revenue Optimization. *The Risk Management Association (RMA)*, 1(1), 80–84.

- Prameswari, A. T. (2020). Analisis Potensi Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pada Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Tanjungpinang. *Repository STIE Pembangunan Tanjungpinang*, 1(1), 9–33.
- Rijali, A. (2019). Analisis Data Kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), 81. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>
- Syarifudin, A. (2018). *Buku Ajar Perpajakan*. Kebumen: STIE Putra Bangsa.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran (2008).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (2018).
- Zulyani, Romadhoni, & Khairullani. (2022). Upaya Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Kegiatan Bongkar Muat Di Ksop Khusus Batam Tahun 2020 - 2021. *Jurnal Inovtek Polbeng*, 12(1).